

Kerangka Acuan

Laporan EITI Indonesia ke-10

I. Pendahuluan

Indonesia telah menjadi bagian dari EITI sejak 2010, ketika menjadi negara kandidat. EITI Indonesia dilaksanakan oleh Multi-Stakeholder Group (MSG) yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Untuk mendukung MSG, terdapat Sekretariat Nasional EITI Indonesia, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis dan operasional sehari-hari pelaksanaan EITI di tanah air. Antara 2011 hingga sekarang, EITI Indonesia telah menghasilkan sembilan laporan yang mencakup pendapatan ekstraktif dari 2009 hingga 2020.

Indonesia telah memulai langkah-langkah menuju tujuan pelembagaan mekanisme transparansi ekstraktif ini. Pada tahun 2020, Peraturan Presiden No.82/2020 mengamanatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaksanakan EITI sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.

Melalui mekanisme pelaporan EITI, data rinci tentang sektor ekstraktif dikelola untuk diungkapkan di satu tempat untuk Indonesia. Hingga tahun 2020, masih terdapat jeda waktu 2 tahun untuk data yang tercakup dalam Laporan. Sejak tahun 2021, relevansi proses EITI dan kegunaan data meningkat secara signifikan melalui peningkatan ketepatan waktu pengungkapan data

Untuk dua laporan terakhir, Indonesia mendapat predikat kemajuan berarti. Negara telah menetapkan target untuk KESDMnuhi semua persyaratan atau standar sehingga laporan selanjutnya akan mendapatkan kemajuan yang memuaskan. Meningkatnya permintaan akan data ekstraktif yang tepat waktu dan bermanfaat memotivasi sekretariat nasional untuk mencari cara untuk mengarusutamakan pengungkapan data ekstraktif ke dalam sistem pemerintah, dan membuat data tersedia dan dapat diakses secara tepat waktu. Sebagai permulaan, EITI Indonesia MSG telah mengirimkan permintaan persetujuan pengarusutamaan sebagian Pelaporan EITI Indonesia ke-10 kepada Dewan Internasional EITI.

Dewan EITI telah menerima permintaan EITI MSG Indonesia untuk implementasi sebagian data mainstreaming. Standar EITI 2019 mendorong negara-negara pelaksana untuk menerapkan pengungkapan sistematis (Bagian 8). Sebagaimana ditunjukkan dalam peta jalan pengarusutamaan, MSG Indonesia akan bekerja dengan kementerian terkait untuk memperkuat pengungkapan sistematis rezim hukum dan fiskal (Persyaratan 2.1), daftar izin (Persyaratan 2.3) data eksplorasi (Persyaratan 3.1), data produksi (Persyaratan 3.2), data ekspor (Persyaratan 3.3), transportasi (Persyaratan 4.4), distribusi pendapatan (Persyaratan 5.1), transfer daerah (Persyaratan 5.2), pengeluaran kuasi fiskal badan usaha milik negara (Persyaratan 6.2) dan kontribusi terhadap perekonomian (Persyaratan 6.3). Data ini sebagian telah diarusutamakan tetapi akan membutuhkan perbaikan lebih lanjut. MSG diharapkan untuk mematuhi peta jalan pengarusutamaannya dalam bekerja menuju pengarusutamaan penuh persyaratan ini.

Laporan EITI ke-10 akan diatur untuk menjembatani pengungkapan sistematis dari persyaratan di atas, sementara tautan terkait disertakan dalam Laporan. Selanjutnya, Laporan akan mengungkapkan informasi tentang partisipasi negara (Persyaratan 2.6), transaksi yang terkait dengan BUMN (Persyaratan 4.5), alokasi kontrak dan izin (Persyaratan 2.2), pengeluaran sosial dan lingkungan

(Persyaratan 6.1), dampak lingkungan (Persyaratan 6.4), subnasional pembayaran (Persyaratan 4.6) dan untuk mengungkapkan data pajak dan pendapatan (Persyaratan 4.1), kontrak (Persyaratan 2.4), Beneficial Ownership (Persyaratan 2.5) dan penjualan bagian produksi negara (Persyaratan 4.2).

II. Garis Besar Laporan Kontekstual EITI Indonesia 2021

Garis besar Laporan Kontekstual EITI Indonesia ke-10, yang memuat tahun anggaran (TA) 2021, akan melanjutkan Garis Besar Laporan EITI Indonesia ke-8 (TA 2018) dan Laporan EITI Indonesia ke-9 (TA 2019-2020). Kecuali informasi direvisi atau ditambahkan, Laporan EITI ke-10 akan mencakup revisi atau tambahan data/informasi persyaratan tertentu. Uraian tersebut disajikan secara rinci pada Bagian III. Garis besarnya ada di bawah ini, menjelaskan informasi umum di setiap bagian.

I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang EITI di Indonesia
- B. EITI Indonesia Progress
 - a. Sekilas tentang pelaporan EITI Indonesia hingga ke-9, dan
 - b. Dukungan pendanaan EGPS EITI Indonesia
- C. Rencana EITI Indonesia hingga 2023
 - a. Peta jalan pengarusutamaan
 - b. Validasi tahun 2023
- D. Penjelasan penulisan laporan EITI Indonesia ke-10
 - a. Struktur Penulisan
 - b. Penjelasan Persyaratan 4.7 (tingkat disagregat data), Persyaratan 4.8 (tahun data), dan Persyaratan 4.9 (kualitas dan jaminan data)

II. Pengungkapan yang Telah Tersistematis

- A. Tata Kelola Industri Ekstraktif
 - a. Kerangka Hukum dan Rezim Fiskal (Persyaratan 2.1)

Bab ini akan mendeskripsikan kerangka hukum pengelolaan industri ekstraktif yang terdiri dari landasan konstitusional tata kelola industri ekstraktif, regulasi yang mengatur industri ekstraktif berdasarkan mata rantai industri ekstraktif serta regulasi mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta implementasi system digitalisasi pengarusutamaan daftar regulasi industri ekstraktif
 - b. Daftar Izin (Persyaratan 2.3)

Bab ini akan menjelaskan daftar izin/kontrak yang beroperasi di Indonesia termasuk jumlah izin/kontrak aktif, lokasi/koordinat izin/kontrak, badan usaha yang memiliki izin/kontrak, dan jenis komoditas. tercakup dalam perizinan/kontrak serta penerapan sistem digitalisasi pengarusutamaan daftar izin/kontrak migas dan minerba.
- B. Pelaksanaan Kegiatan Industri Ekstraktif
 - a. Eksplorasi (Persyaratan 3.1)

Bab ini akan menjelaskan secara umum kegiatan eksplorasi industri ekstraktif di Indonesia, terutama kegiatan eksplorasi yang signifikan, perusahaan yang melakukan eksplorasi, jumlah eksplorasi, dan nilai investasi eksplorasi serta penerapan digitalisasi sistem pengarusutamaan kegiatan dan data eksplorasi migas dan minerba.
 - b. Produksi (Persyaratan 3.2)

Pada bab ini dijelaskan secara umum kegiatan produksi industri ekstraktif untuk tiap komoditas utama (migas, batubara, mineral utama) termasuk nilai volume produksi tiap komoditas, serta implementasi system digitalisasi pengarusutamaan data produksi migas dan minerba.

c. Ekspor (Persyaratan 3.3)

Bab ini menjelaskan secara umum kegiatan ekspor industri ekstraktif untuk setiap komoditas utama (migas, batubara, mineral utama) termasuk nilai volume ekspor masing-masing komoditas, serta penerapan sistem digitalisasi. untuk pengarusutamaan data ekspor migas dan minerba.

C. Penerimaan Negara dari Sektor Industri Ekstraktif

a. Pendapatan transportasi (Req. 4.4)

Bagian ini memberikan ringkasan informasi pendapatan transportasi dari batubara yang diterima oleh PT Kereta Api Indonesia, sebuah BUMN transportasi kereta api.

D. Alokasi Penerimaan Negara dari Sektor Industri Ekstraktif

a. Distribusi Pendapatan (Persyaratan 5.1)

b. Dana Bagi Hasil dari minyak, gas, mineral, dan batubara (Persyaratan 5.2).

Bab ini menjelaskan tentang alokasi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif berupa transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), formula dan mekanisme penyaluran DBH serta penerapan sistem digitalisasi pengarusutamaan data alokasi DBH dan penerimaan daerah dari sektor migas dan minerba.

E. Kontribusi Sosial dan Ekonomi Industri Ekstraktif Indonesia

a. Pengeluaran Kuasi Fiskal BUMN (Persyaratan 6.2)

Bagian ini menjelaskan informasi kuasi fiskal BUMN migas dan pertambangan.

b. Kontribusi Ekonomi (Persyaratan 6.3)

Bagian ini menjelaskan kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian nasional termasuk pengaruh/rasio PDB sektor pertambangan terhadap PDB Nasional, investasi, dan penyerapan tenaga kerja (gender) di sektor industri ekstraktif serta penerapan sistem digitalisasi untuk pengarusutamaan data kontribusi ekonomi. Ini dari sektor migas dan minerba

III. Pengungkapan Dalam Pelaporan EITI Indonesia ke-10

A. Tata Kelola Industri Ekstraktif

a. Alokasi kontrak dan izin (Persyaratan 2.2)

Bab ini akan menjelaskan tentang proses pemberian ijin usaha pertambangan atau wilayah kerja migas melalui lelang termasuk publikasi informasi lelang, kriteria teknis dan finansial peserta lelang, jumlah izin yang diberikan di tahun tertentu serta implementasi sistem digitalisasi pengarusutamaan proses lelang migas dan minerba.

b. Pengungkapan Data Kontrak (Persyaratan 2.4)

Bagian ini menjelaskan kemajuan kegiatan pengungkapan kontrak migas dan pertambangan, serta uji konsekuensi informasi publik atas kontrak.

c. Pengungkapan Data Beneficial Ownership (Persyaratan 2.5)

Bagian ini menjelaskan bahwa data Beneficial Ownership (BO) industri ekstraktif telah tersedia pada domain publik, serta penjelasan ringkasan dari detail data BO pada lampiran.

d. Partisipasi BUMN Sektor Industri Ekstraktif (Persyaratan 2.6)

Bab ini menjelaskan hubungan antara BUMN dan Pemerintah dalam hal hubungan keuangan, kepemilikan negara, pinjaman dan jaminan, dan tata kelola perusahaan BUMN.

B. Penerimaan/Pendapatan Negara dari Sektor Industri Ekstraktif

a. Penerimaan Pajak dan PNB (Persyaratan 4.1)

Bagian ini menjelaskan komposisi realisasi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif, penerimaan pajak dan PNB dari industri ekstraktif serta penerapan sistem digitalisasi pengarusutamaan data penerimaan negara bagi sektor migas dan minerba

b. Penjualan Hasil Bagian Negara dalam Bentuk Natura (*in-kind*) (Persyaratan 4.2)

Bagian ini memberikan informasi tentang pendapatan dalam bentuk natura (*in-kind*) yang berasal dari minyak dan gas bumi.

c. Transaksi Keuangan BUMN dengan Pemerintah (Persyaratan 4.5)

Bagian ini menjelaskan tentang aliran transaksi keuangan (transfer dan pembayaran) antara BUMN dengan Pemerintah terkait industri ekstraktif

d. Pembayaran kepada pemerintah daerah (Persyaratan 4.6)

Bagian ini menjelaskan tentang informasi pembayaran dari perusahaan/industri ekstraktif kepada pemerintah daerah dari sektor migas dan minerba.

C. Kontribusi Sosial dan Ekonomi Industri Ekstraktif Indonesia

a. Pengeluaran Sosial dan Lingkungan dan Dampak Lingkungan (Persyaratan 6.1 dan Persyaratan 6.4)

Bagian ini menjelaskan pengelolaan dampak lingkungan akibat industri ekstraktif termasuk alokasi pemerintah dan perusahaan industri ekstraktif untuk penanganan dampak lingkungan serta informasi tentang tanggung jawab lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak dari perusahaan industri ekstraktif serta program pemberdayaan masyarakat.

IV. Lampiran

Lampiran berisi data disagregat untuk pengungkapan data BO (Persyaratan 2.5), produksi (Persyaratan 3.2); penerimaan pajak & PNB (Persyaratan 4.1), penjualan hasil bagian negara dalam bentuk natura (*in-kind*) (Persyaratan 4.2), pembayaran pada daerah (Persyaratan 4.6), pengeluaran sosial dan lingkungan (Persyaratan 6.1).

Data yang disajikan berbentuk disagregat per KKKS minyak/gas bumi dan per perusahaan mineral/batubara yang material. KKKS migas yang material adalah seluruh KKKS yang memberikan kontribusi kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas (total 100%) di tahun 2021. Perusahaan mineral/batubara yang material adalah perusahaan-perusahaan minerba yang memberikan masuk sebagai kontributor PNB Mineral/Batubara sebesar 95% dari total PNB Minerba tahun 2021. Data daftar perusahaan berasal dari SKK Migas dan Ditjen Mineral Batubara, KESDM.

III. Pengarusutamaan Sebagian dan Isi Pelaporan EITI Indonesia ke-10

Bagian ini menguraikan informasi yang akan dimasukkan dalam Bagian Pengungkapan Tersistematis (*Systematic Disclosure*) dan Bagian Pengungkapan dalam Laporan EITI Indonesia ke-10. Bagian Pengungkapan Tersistematis berisi tautan dan deskripsi singkat atau ringkasan informasi yang telah tersedia dalam tautan. Sesuai dengan keputusan Dewan Internasional EITI, Bagian Pengungkapan Tersistematis (*Systematic Disclosure*) akan menyertakan tautan dan deskripsi singkat terkait dengan Persyaratan:

1. Rezim hukum dan fiskal (Persyaratan 2.1);
2. Daftar Perizinan (Persyaratan 2.3);
3. Eksplorasi (Persyaratan 3.1);
4. Produksi (Persyaratan 3.2);
5. Ekspor (Persyaratan 3.3);
6. Transportasi (Persyaratan 4.4);
7. Distribusi pendapatan (Persyaratan 5.1);
8. Transfer subnasional (Persyaratan 5.2);
9. Pengeluaran kuasi fiskal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Persyaratan 6.2); dan
10. Kontribusi terhadap ekonomi (Persyaratan 6.3).

Laporan EITI Indonesia ke-10 akan mengungkapkan informasi tentang persyaratan berikut. Untuk persyaratan yang memiliki informasi yang tersedia untuk umum, Laporan akan merujuk ke tautan dan memberikan ringkasan informasi. Untuk persyaratan yang tidak tersedia pada situs online, Laporan akan mengungkapkan informasi secara detail dan komprehensif.

1. Alokasi Kontrak dan Izin (Persyaratan 2.2)
2. Kontrak (Persyaratan 2.4)
3. Beneficial Ownership (Persyaratan 2.5)
4. Partisipasi Negara (Persyaratan 2.6)
5. Pajak dan Pendapatan (Persyaratan 4.1)
6. Penjualan Hasil Bagian Negara dalam Bentuk Natura (*in-kind*) (Persyaratan 4.2)
7. Transaksi Terkait dengan BUMN (Persyaratan 4.5)
8. Subnational Payments (Requirement 4.6)
9. Pengeluaran sosial dan lingkungan (Persyaratan 6.1)
10. Dampak Lingkungan (Persyaratan 6.4)

Tabel berikut memberikan informasi detail untuk setiap persyaratan dalam Laporan.

A. Bagian Pengungkapan Tersistematis (*Systematic Disclosure*)

1. Persyaratan 2.1 Kerangka Hukum

Sektor	Persyaratan	Tautan	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Sektor Pertambangan	Apakah pemerintah mempublikasikan informasi tentang Peraturan Perundang-undangan?	https://webjdih.esdm.go.id/ https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result?q=	Informasi tambahan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan akan menambah apa yang telah dijelaskan dalam Laporan ke-9.
	Ikhtisar peran lembaga pemerintah?	https://www.minerba.esdm.go.id/	
	Rezim hak mineral dan minyak bumi?		
	Rezim fiskal?	https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home	
	Tingkat devolusi fiskal?	https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home	
	Reformasi yang sedang berlangsung dan direncanakan?	-	
Sektor minyak dan gas	Apakah pemerintah mempublikasikan informasi tentang Peraturan Perundang-undangan?	https://webjdih.esdm.go.id/ https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result?q= https://migas.esdm.go.id/category/regulasi	Informasi tambahan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang menambahkan Laporan ke-9 akan dimuat pada Laporan.
	Ikhtisar peran lembaga pemerintah?	https://migas.esdm.go.id/ https://migas.esdm.go.id/category/regulasi	
	Rezim hak mineral dan minyak bumi?	https://migas.esdm.go.id/category/regulasi	
	Rezim fiskal?	https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home https://migas.esdm.go.id/category/regulasi	
	Tingkat devolusi fiskal?	https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home https://migas.esdm.go.id/category/regulasi	
	Reformasi yang sedang berlangsung dan direncanakan?		

2. Persyaratan 2.3 Pendaftaran lisensi

	Persyaratan	Tautan	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Sektor pertambangan	Daftar izin untuk sektor pertambangan	https://www.minerba.esdm.go.id/pdf/109-Panduan%20Perizinan%20Online https://www.minerba.esdm.go.id/page/109-Panduan%20Perizinan%20Minerba	
	Nama pemegang lisensi:	https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan	

	Koordinat lisensi:	https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/home/# (Dilengkapi dari Ditjen Minerba, KESDM)	Laporan akan memberikan gambaran tentang pemberian izin dan link dalam aplikasi MODI, yang terdiri antara lain nama perusahaan, koordinat, tanggal aplikasi, pemberian, kadaluarsa, komoditas, dll. Laporan akan menyertakan elemen data untuk pengungkapan sistematis.
	Tanggal izin aplikasi, pemberian dan kedaluarsa		
	Komoditas yang dicakup oleh lisensi::		
	Cakupan semua izin aktif?	(Dilengkapi dari Ditjen Minerba, KESDM)	Ada 214 perusahaan pertambangan material. Daftar IUP perusahaan yang material tersebut akan diberikan dalam tabel di bagian ini.
	Cakupan semua izin yang dipegang oleh perusahaan material?		

3. Persyaratan 3.1 Kegiatan Eksplorasi

Persyaratan	Tautan	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Sekilas tentang industri ekstraktif	On mineral and coal: http://psdg.geologi.esdm.go.id/images/stories/2022/Buku%20Neraca%202021%2007-04-2022.pdf	Informasi terbaru tentang eksplorasi akan dimasukkan dalam bagian ini.
Tinjauan perusahaan-perusahaan kunci dalam industri ekstraktif	On oil and gas sector: https://migas.esdm.go.id/uploads/uploads/E--Statistik-semester-2021-(21-02-2022)-ok-(2).pdf	
Ikhtisar kegiatan eksplorasi yang signifikan		

4. Persyaratan 3.2 Data produksi

Persyaratan	Tautan	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Pengungkapan volume produksi		Laporan akan berisi ringkasan dari informasi volume dan nilai produksi migas dan minerba
Pengungkapan nilai produksi		
Minyak mentah, volume	https://migas.esdm.go.id/post/read/buku-statistik-migas (Buku Statistik Migas Semester I-2021, Table 1.5 by PSC Oil) https://lifting.skkmigas.go.id/tab/lifting2/index.php	Lifting oleh KKKS sebagaimana dilaporkan secara sepihak oleh masing-masing KKKS Minyak Bumi dimasukkan dalam Lampiran Laporan dalam file excel. (lihat juga pada Persyaratan 4.2)
Minyak mentah, nilai	(To be completed from DG Oil and Gas, KESMD)	
Natural gas, volume	https://migas.esdm.go.id/post/read/buku-statistik-migas (Buku Statistik Migas Semester I-2021, Table 1.6 by PSC Gas)	Lifting oleh KKKS sebagaimana dilaporkan secara sepihak oleh masing-masing KKKS Gas dimasukkan dalam Lampiran Laporan dalam file excel. (lihat juga pada Persyaratan 4.2)
Gas alam, nilai	(Dilengkapi dari Ditjen Migas, KESDM)	

Emas, volume & nilai	https://modi.esdm.go.id/emas	Laporan akan berisi ringkasan volume dan nilai produksi untuk setiap komoditas yang besar kontribusinya bagi Indonesia.
Perak, volume & nilai	https://modi.esdm.go.id/perak	
Batubara, volume & nilai	https://modi.esdm.go.id/produksi-batubara	
Tembaga (2603), nilai	https://modi.esdm.go.id/tembaga	Produksi mineral dan batubara sebagaimana dilaporkan secara sepihak oleh masing-masing perusahaan pertambangan akan dimasukkan dalam Lampiran Laporan dalam file excel.
Nikel Matte, Nickel Pig Iron, Ferro Nikel, volume & nilai	(Dilengkapi dari informasi Ditjen Minerba, KESDM)	
Tambahkan komoditas disini, nilai		

5. Persyaratan 3.3 Ekspor data

Persyaratan	Tautan, jika ini diungkapkan secara sistematis	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Pengungkapan volume produksi		
Pengungkapan nilai produksi		
Minyak mentah (2709), volume	https://migas.esdm.go.id/post/read/buku-statistik-migas	Laporan akan memuat gambaran ekspor migas secara ringkas. Detailnya akan merujuk ke tautan yang dipublikasikan.
Minyak mentah (2709), nilai		
Gas alam (2711), volume		
Gas alam (2711), value		
Komoditas mineral, volume dan nilai	https://www.bps.go.id/publication/2022/07/06/280d543f68304d58371310b5/analisis-komoditas-ekspor-2017-2021-sektor-pertanian-kehutanan-dan-perikanan-industri-pengolahan-pertambangan-dan-lainnya.html	Laporan ini akan memberikan gambaran tentang ekspor pertambangan secara ringkas. Detailnya akan merujuk ke tautan yang dipublikasikan.

6. Persyaratan 4.4: Pendapatan transportasi

Persyaratan	Tautan, jika ini diungkapkan secara sistematis	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Apakah pemerintah mengungkapkan informasi pendapatan transportasi?	Ya, pendapatan transportasi industri ekstraktif diterapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI) hingga angkutan batubara	Uraian singkat akan dimasukkan dalam bagian C tentang pendapatan transportasi.
Jika ya, apakah aliran pendapatan ini telah diungkapkan sepenuhnya ke tingkat pemilahan yang sepadan dengan aliran pembayaran dan pendapatan lainnya (4.7), dengan perhatian yang tepat pada kualitas data (4.9)?	https://www.kai.id/static/laporan-keuangan/lk_audited_2021.pdf (page 158)	Laporan ini akan mencakup penjelasan singkat dan jumlah pendapatan yang diterima pada tahun 2021 berdasarkan informasi pada tautan.

7. Persyaratan 5.1 Distribusi pendapatan

Persyaratan	Tautan, jika ini diungkapkan secara sistematis	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Apakah pemerintah secara terbuka mengklarifikasi apakah semua pendapatan sektor ekstraktif dicatat dalam anggaran nasional (yaitu masuk ke rekening konsolidasi/perbendaharaan tunggal pemerintah)?	https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/GQ2sJpbBchlksmk	Laporan tersebut akan memuat ringkasan rekening terkait sektor ekstraktif sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 yang telah diaudit (dalam tautan)
Apakah pemerintah mengungkapkan secara terbuka jenis pendapatan tertentu yang tidak dicatat dalam anggaran?	Setiap jenis pendapatan telah dicatat dalam anggaran. Tidak ada akun tambahan atau non-budgeter.	-
Apakah pemerintah secara terbuka mengungkapkan nilai penerimaan yang tidak tercatat dalam APBD?		

8. Persyaratan 5.2 Transfer subnasional

	Persyaratan	Tautan, jika ini diungkapkan secara sistematis	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Mekanisme bagi hasil: DBH Migas dan DBH Minerba (Dana Bagi Hasil Migas dan Mineral-batubara)	Apakah pemerintah mengungkapkan informasi tentang transfer Subnasional?	Ya	Laporan tersebut akan memuat informasi menyusul Laporan Dana Bagi Hasil Minyak, Gas Bumi, Mineral, dan Batubara (DBH) ke-8 dan ke-9. Peraturan, data, dan informasi yang tidak direvisi atau diperbarui akan mengacu pada Laporan EITI Indonesia sebelumnya. Oleh karena itu, Laporan ke-10 akan memuat ringkasan jumlah DBH pada tahun 2021 dan informasi terkini terkait DBH yang dialokasikan dan ditransfer ke tingkat daerah.
	Jika ya, apakah ada pengungkapan publik tentang formula bagi hasil menurut undang-undang?	https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/FORMULA-DBH-2021.pdf	
	Jika ya, apakah informasi tentang berapa banyak yang seharusnya ditransfer pemerintah menurut formula bagi hasil kepada masing-masing pemerintah daerah yang relevan diungkapkan kepada publik?	https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd	
	Jika ya, apakah informasi tentang seberapa banyak sebenarnya transfer pemerintah dalam praktiknya ke masing-masing pemerintah daerah yang relevan diungkapkan kepada publik?		

9. Persyaratan 6.2 Pengeluaran kuasi fiskal BUMN

	Persyaratan	Tautan, jika ini diungkapkan secara sistematis	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10

Pengeluaran kuasi-fiskal: Kewajiban Pasar Domestik (DMO)	Apakah pemerintah atau BUMN mengungkapkan informasi tentang pengeluaran kuasi-fiskal?	Ya	Laporan ini akan memberikan ringkasan informasi tentang: - Minyak DMO dari Pertamina - Batubara DMO dari PT Bukit Asam
	Jika ya, berapa nilai total pengeluaran kuasi fiskal yang dilakukan oleh BUMN?	Indonesian Coal SOE, PT. Bukit Asam https://www.ptba.co.id/uploads/ptba_laporan_audit_keuangan/20220307133801-2022-03-07ptba_laporan_audit_keuangan133728.pdf Pertamina: https://pertamina.com///Media/File/Pertamina_Annual_Report_2021.pdf page 582 and 659,	

10. Persyaratan 6.3: Kontribusi sektor ekstraktif terhadap perekonomian

Persyaratan	Tautan, jika ini diungkapkan secara sistematis	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Apakah pemerintah mengungkapkan informasi tentang kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian?	Ya	
Produk Domestik Bruto - SNA 2008 C. Pertambangan dan penggalian, termasuk minyak dan gas	https://www.bps.go.id/indicator/11/65/1/-seri-2010-pdb-seri-2010.html	Laporan ini akan memberikan informasi tentang kontribusi sektor ekstraktif terhadap perekonomian, berdasarkan dokumen di tautan. Beberapa informasi dalam bentuk tabel ringkasan data.
Produk Domestik Bruto - semua sektor		
Produk Domestik Bruto <i>Artisanal Small Mining</i> (ASM) dan sektor informal	(Dilengkapi dari BPS dan Ditjen Minerba, KESDM)	Informasi jumlah tenaga kerja pada perusahaan pertambangan, sebagaimana dilaporkan secara sepihak oleh perusahaan pertambangan, akan dimasukkan dalam Lampiran Laporan dalam file excel.
Pendapatan pemerintah - industri ekstraktif	http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1038	
Pendapatan pemerintah - semua sektor		
Ekspor - industri ekstraktif	https://www.bps.go.id/exim/	
Ekspor - semua sektor	https://www.bps.go.id/subject/8/ekspor-impor.html#subjekViewTab3 https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/26be062174f75074093a92ff/buletin-statistik-perdagangan-luar-negeri-ekspor-menurut-hs-desember-2021.html	
Pekerjaan - sektor ekstraktif - laki-laki	https://www.bps.go.id/publication/2021/12/21/a15176a0d458bc8f297d3ee7/statistik-mobilitas-penduduk-dan-tenaga-kerja-2021.html	
Pekerjaan - sektor ekstraktif - perempuan		

Pekerjaan - sektor ekstraktif	https://www.bkpm.go.id/id/statistik https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik	
Ketenagakerjaan - semua sektor		
Investasi - sektor ekstraktif		
Investasi - semua sektor		
Apakah pemerintah mengungkapkan informasi tentang lokasi kegiatan ekstraktif utama di negara ini?	https://geoportal.esdm.go.id/migas/ https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/home/	

B. Bagian Pengungkapan Dalam Pelaporan EITI Indonesia ke-10

1. Persyaratan 2.2 Alokasi Izin dan Kontrak

	Persyaratan	Tautan	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Sektor pertambangan	Apakah pemerintah mempublikasikan informasi tentang		
	Jumlah pemberian izin untuk tahun yang dicakup	https://www.minerba.esdm.go.id/page/4-Pengumuman%20CNC https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan	Laporan akan berisi pembaruan jumlah pemberian izin per 31 Desember 2021. Bagian ini juga akan mencakup ringkasan proses pemberian pemberian dan kriteria teknis & keuangan.
	proses pemberian?	https://www.minerba.esdm.go.id/pdf/238-Standar%20Pelayanan https://www.minerba.esdm.go.id/upload/file_menu/20220916131049.pdf https://perizinan.esdm.go.id/minerba/	(Dilengkapi informasi Ditjen Minerba, Kementerian ESDM)
	dan kriteria teknis dan keuangan yang digunakan?	https://www.minerba.esdm.go.id/pdf/109-Panduan%20Perizinan%20Online https://www.minerba.esdm.go.id/perizinan/persyaratan	Deskripsi Ringkasan persyaratan kriteria teknis dan finansial akan diberikan pada sub bagian ini.
	adanya penyimpangan non-trivial dari prosedur hukum dalam pemberian izin pada periode yang ditinjau?	-	tidak ada
	Jumlah transfer izin untuk tahun yang dicakup	-	Informasi saya tidak tersedia karena transfer izin tidak diperbolehkan oleh peraturan. (Diisi dari Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, jika ada.)

	jumlah dan identitas izin yang dialihkan dalam periode yang ditinjau?	-	tidak ada transfer izin
	proses transfer?	-	tidak ada transfer izin
	dan kriteria teknis dan keuangan yang digunakan?	-	tidak ada transfer izin
	adanya penyimpangan non-trivial dari prosedur hukum dalam transfer izin pada periode yang ditinjau?	-	tidak ada transfer izin
	putaran/proses penawaran?	(Dilengkapi dari Ditjen Minerba, KESDM)	Laporan akan memuat informasi singkat tentang perbedaan antara izin dan kontrak umum di bawah kegiatan pertambangan.
Sektor minyak dan gas	Apakah pemerintah mempublikasikan informasi tentang		
	Pemberian izin sektor minyak dan gas untuk tahun yang dicakup	https://www.esdm.go.id/wkmigas/ https://drive.esdm.go.id/wl/?id=7UvnVtz4VkjSlDwJv0GyciDlJITXN7vK (The winning bidder of Direct Proposal Tender - 2nd Bid Round 2021)	Update informasi penawaran Wilayah Kerja Minyak/Gas (WK Migas), termasuk tabel detail yang berisi daftar Hasil Lelang 2021 (Blok, Wilayah Kerja, nama PSC, bonus tanda tangan, dan bonus komitmen)
	proses pemberian?	https://migas.esdm.go.id/post/category/informasi-layanan-publik https://www.skkmgas.go.id/en/info-lelang https://www.esdm.go.id/wkmigas/	Uraian tersebut mengacu pada Laporan EITI ke-8 sub-bab 4.1.1.1. Informasi singkat yang diperbarui akan diberikan di sub-bagian ini.
	dan kriteria teknis dan keuangan yang digunakan?	https://www.skkmgas.go.id/en/info-lelang https://www.esdm.go.id/wkmigas/	Informasi singkat yang diperbarui akan diberikan pada sub-bagian ini.
	adanya penyimpangan non-sepele dari prosedur hukum dalam pemberian izin pada periode yang ditinjau?	-	
	Jumlah transfer izin untuk tahun yang dicakup		Update informasi pengalihan Participating Interest (PI) akan dicantumkan pada bagian ini.
	jumlah dan identitas izin yang dialihkan dalam periode yang ditinjau?		
	proses transfer?		
	dan kriteria teknis dan keuangan yang digunakan?		Informasi proses transfer dan kriteria teknis dan keuangan diberikan secara singkat di bagian ini.

	adanya penyimpangan non-sepele dari prosedur hukum dalam transfer izin pada periode yang ditinjau?	-	(Informasi meliputi yang diberikan oleh Ditjen Migas atau SKK Migas, Kementerian ESDM)
	putaran/proses penawaran?	https://www.esdm.go.id/wkmigas/ https://www.skkmigas.go.id/info-lelang/tender-kkks	Beberapa informasi akan diberikan di bagian ini sektor minyak/gas untuk memberikan gambaran singkat tentang tautan terkait

2. Persyaratan 2.4 Kontrak

Requirement	Tautan	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Kebijakan pemerintah tentang kontrak dan pengungkapan lisensi	https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan	
Untuk kontrak yang dilaksanakan setelah 1 Januari 2021: Apakah teks kontrak termasuk lampiran dan amandemen diungkapkan sepenuhnya?	Tidak	Laporan akan memuat kemajuan dari : - uji konsekuensial dan matriks mitigasi risiko; - elemen data yang sudah termasuk dalam aplikasi yang dikembangkan oleh KESDM.
Untuk izin yang dilaksanakan setelah 1 Januari 2021 Apakah teks izin termasuk lampiran dan amandemen diungkapkan sepenuhnya?		
Daftar kontrak untuk sektor pertambangan		Kontrak Karya Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK) Minera termasuk dalam Laporan ke-9. Laporan ke-10 akan mengacu pada itu, sambil memberikan penjelasan jika ada pembaruan.
Daftar kontrak untuk sektor perminyakan	https://migas.esdm.go.id/post/read/kontraktor-kontrak-kerja-sama-1 PCM, Warroom (by DG Oil and Gas, KESMD (not-publicly accessed) (https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan)	Laporan tersebut akan memberikan gambaran mengenai elemen data yang sudah tersedia di PCM yang terkait dengan kontrak Migas. Informasi pada bagian ini juga dikumpulkan dari dari informasi yang diberikan oleh Ditjen Migas dan SKK Migas, Kementerian ESDM
Daftar izin untuk sektor pertambangan	https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan	
Daftar izin untuk sektor perminyakan	https://www.skkmigas.go.id/publikasi/lifting-dashboard	
Apakah ada daftar yang dapat diakses publik dari semua kontrak eksploitasi dan eksplorasi aktif?	https://www.skkmigas.go.id/contact/kkks-produksi	

	https://www.skkmigas.go.id/contact/kkks-eksplorasi	
Apakah ada daftar yang dapat diakses publik dari semua izin eksploitasi dan eksplorasi aktif?	https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan	
Apakah ada kontrak/izin yang dilaksanakan sebelum 1 Januari 2021, yang diungkapkan kepada publik?	The list is available in the same links above	

3. Persyaratan 2.5 Kepemilikan manfaat

Persyaratan	Tautan	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Kebijakan pemerintah tentang Beneficial Ownership	https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen-esdm-243-Thn%202019.pdf	
Definisi dari istilah pemilik manfaat	https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73583/perpres-no-13-tahun-2018	Laporan akan memberikan definisi dari istilah pemilik manfaat; hukum, peraturan, atau kebijakan; dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab.
Undang-undang, peraturan atau kebijakan tentang Beneficial Ownership	Oil/gas entities: https://www.skkmigas.go.id/assets/PTK/83cdca4ec63a7e52157c6dec167886b7.pdf	
Apakah data Beneficial Ownership diminta?	Ya	Laporan ini akan memberikan gambaran tentang metode pengumpulan data.
Apakah data Beneficial Ownership diungkapkan?	bo.ahu.go.id (oleh Kemenkumham) bo.esdm.go.id (oleh KESDM)	Laporan ini akan memberikan informasi tentang: pemilik sah dan pemilik manfaat, perusahaan yang dianggap material, di sektor minyak/gas dan sektor mineral/batubara. Daftar tersebut akan dimasukkan dalam Lampiran.
Apakah data Beneficial Ownership diungkapkan oleh pemohon dan penawar?		
Jaminan kualitas untuk keandalan data		
Nama bursa untuk perusahaan publik		
Apakah informasi tentang pemilik sah diungkapkan?	https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan	
Daftar perusahaan (registrasi kepemilikan yang sah)	https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan	
Registri kepemilikan yang bermanfaat	https://bo.esdm.go.id/	

4. Persyaratan 2.6 Partisipasi negara

	Persyaratan	Tautan	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Penerapan	Apakah pemerintah melaporkan bagaimana partisipasinya di sektor ekstraktif?	https://mind.id/pages/members#pt-antam-tbk https://www.pertamina.com/	
	Di mana aturan dan praktik perundang-undangan tentang hubungan keuangan BUMN dengan pemerintah dijelaskan?	https://www.antam.com/en/reports/annual-reports https://www.ptba.co.id/laporan/laporan-audit-keuangan	Bagian ini akan memberikan ringkasan deskripsi peraturan perundang-undangan BUMN, hubungan keuangan dengan Negara, kepemilikan Negara, pinjaman dan penjaminan, dan tata kelola perusahaan, lihat tautan Informasi tersebut sebagian besar didasarkan pada informasi yang disajikan dalam laporan tahunan dan laporan keuangan BUMN.
	Di mana aturan dan praktik perundang-undangan tentang hak BUMN atas transfer dari pemerintah dijelaskan?	https://ptfi.co.id/id/publication https://timah.com/blog/report/annual-report.html	
	Di mana aturan dan praktik perundang-undangan tentang pembagian keuntungan BUMN dijelaskan?	https://www.pertamina.com/id/dokumen/laporan-tahunan	
	Di mana aturan dan praktik hukum tentang kemampuan BUMN untuk menahan laba dijelaskan?	https://www.pertamina.com/id/laporan-keuangan	
	Di mana aturan dan praktik hukum tentang reinvestasi BUMN dijelaskan?		
	Di mana aturan dan praktik perundang-undangan terkait pembiayaan pihak ketiga BUMN dijelaskan?		
Hubungan keuangan dalam praktik	Rujukan ke portal BUMN atau website perusahaan, misalnya sebagaimana tercantum dalam Laporan (Tambah baris jika beberapa BUMN)	https://www.antam.com/en/reports/annual-reports https://www.ptba.co.id/laporan/laporan-audit-keuangan https://ptfi.co.id/id/publication https://timah.com/blog/report/annual-report.html https://www.pertamina.com/id/dokumen/laporan-tahunan https://www.pertamina.com/id/laporan-keuangan	
	Referensi Badan Usaha Milik Negara atau Laporan Keuangan Audit perusahaan (Tambah baris jika beberapa BUMN)	https://www.antam.com/en/reports/annual-reports https://www.ptba.co.id/laporan/laporan-audit-keuangan	

		https://ptfi.co.id/id/publication https://timah.com/blog/report/financial-report.html https://www.pertamina.com/id/laporan-keuangan	
Kepemilikan negara	Di mana informasi tentang ekuitas negara dan BUMN di perusahaan ekstraktif diungkapkan kepada publik?	(Dilengkapi dari KBUMN)	
	Di mana informasi tentang ketentuan yang melekat pada ekuitas negara dan BUMN di perusahaan ekstraktif diungkapkan kepada publik?	Dilengkapi dari KBUMN)	
	Di mana informasi tentang partisipasi negara dan BUMN dalam proyek ekstraktif diungkapkan kepada publik?	Dilengkapi dari KBUMN)	
	Di mana informasi tentang persyaratan yang melekat pada partisipasi negara dan BUMN dalam proyek ekstraktif diungkapkan kepada publik?	Dilengkapi dari KBUMN)	
Pinjaman dan jaminan	Di mana pinjaman dan jaminan pinjaman dari negara kepada perusahaan dan proyek ekstraktif diungkapkan?	Dilengkapi dari KBUMN)	
	Di mana pinjaman dan jaminan pinjaman dari BUMN kepada perusahaan dan proyek ekstraktif diungkapkan?	Dilengkapi dari KBUMN)	
Tata kelola perusahaan	Dimana informasi tata kelola perusahaan pada BUMN diungkapkan kepada publik?	https://mind.id/pages/governance	

5. Persyaratan 4.1 Pengungkapan pajak dan pendapatan secara komprehensif

Persyaratan	Tautan	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Apakah pemerintah mengungkapkan sepenuhnya pendapatan sektor ekstraktif berdasarkan aliran pendapatan?	https://ppid.lkpp.go.id/information/public/416/laporan-keuangan-lkpp-tahun-2021-audited https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/GQ2sJpbBchlksmk	Laporan ini akan memberikan gambaran penerimaan sektor ekstraktif menurut aliran penerimaan sebagaimana dilaporkan dalam LKPP tahun 2021 yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pada bagian ini.
Apakah aliran pendapatan yang dianggap material terdaftar dan dijelaskan secara publik?	Ya, https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/GQ2sJpbBchlksmk	

		Laporan ini akan memberikan informasi tentang materialitas aliran penerimaan yang termasuk dalam LKPP 2021.
Apakah semua perusahaan material telah sepenuhnya melaporkan semua pembayaran sesuai dengan definisi materialitas?	https://epnbpminerba.esdm.go.id/ (not yet publicly disclosed)	Laporan bagian ini akan memberikan gambaran aliran penerimaan material sektor minyak, gas, pertambangan Pembayaran terpilah yang dilaporkan secara sepihak oleh masing-masing perusahaan migas/mineral/batubara dicantumkan dalam Lampiran Laporan dalam file excel. Data didasarkan pada formulir yang diisi oleh KKKS migas dan perusahaan pertambangan.
Apakah semua entitas pemerintah yang material telah sepenuhnya melaporkan semua penerimaan sesuai dengan definisi materialitas?		
Apakah pemerintah telah sepenuhnya melaporkan semua pendapatan, termasuk pendapatan di bawah ambang batas materialitas?	Ya, https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/lkpp/LKPP_audited_2021.pdf https://setkab.go.id/en/govt-earns-highest-audit-rating-for-2021-financial-report/	Penerimaan terpilah dari industri ekstraktif yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran (migas) dan Ditjen Minerba (mineral/batubara) akan dimasukkan dalam Lampiran Laporan dalam file excel.
Apakah perusahaan yang melakukan pembayaran material kepada pemerintah mengungkapkan kepada publik laporan keuangan mereka yang telah diaudit, atau item utama (yaitu neraca, laporan laba rugi, arus kas) di mana laporan keuangan tidak tersedia?	-	Dokumen ini akan dimasukkan dalam Lampiran Laporan dalam hal pernyataan yang ditandatangani dari perusahaan minyak/gas/mineral/batubara

6. Persyaratan 4.2 Pendapatan dalam Bentuk Natura (*In-Kind*)

Persyaratan	Tautan	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Apakah hasil penjualan penerimaan natura negara dianggap material oleh MSG pada periode yang diperiksa?	Secara agregat terdapat dalam bagian pembentuk LKPP 2021 https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/GQ2sJpbBchksmk	Laporan akan memberikan informasi tentang pendapatan dalam bentuk natura (in-kind) yang berasal dari minyak dan gas bumi. Laporan berisi penjelasan elemen data dalam SOT Migas tentang penjualan menurut jenis minyak, kapal, volume, dst.
Apakah pemerintah mengungkapkan data pendapatan natura dan penjualan bagian produksi negara?		

Jika ya, berapa volume yang diterima?	Aplikasi terdapat pada SKK Migas dan Ditjen Migas, KESDM yaitu Warroom dan SOT Migas	<p>Laporan ini akan berisi iisi dari informasi yang diberikan oleh Ditjen Migas, ESDM; SKK Migas, ESDM; Ditjen Anggaran, Kemenkeu.</p> <p>Lifting oleh KKKS sebagaimana dilaporkan secara sepihak oleh masing-masing KKKS Minyak Bumi dimasukkan dalam Lampiran Laporan dalam file excel.</p> <p>Lifting oleh KKKS sebagaimana dilaporkan secara sepihak oleh masing-masing KKKS Gas dimasukkan dalam Lampiran Laporan dalam file excel.</p>
Minyak mentah (2709), volume		
Gas alam (2711), volume		
Jika ya, apa yang dijual?		
Minyak mentah (2709), volume		
Minyak mentah (2709), nilai		
Gas alam (2711), volume		
Gas alam (2711), nilai		
Jika ya, berapa total penerimaan negara dari hasil penjualan minyak, gas, dan mineral?		

7. Persyaratan 4.5 Transaksi antara BUMN dengan entitas pemerintah

Persyaratan	Tautan, jika ini diungkapkan secara sistematis	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Apakah pemerintah mengungkapkan informasi transaksi BUMN?	Ya	Laporan tersebut akan memberikan informasi singkat tentang apa yang telah ditransfer atau dibayarkan antara BUMN dan pemerintah, jika pembayaran dianggap material oleh MSG. Informasi tentang ini akan ditambahkan di bagian ini.
Jika ya, apakah pembayaran perusahaan kepada BUMN dianggap material oleh MSG?	Information on SOEs transfer and payments is consolidated in this document: https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/lkpp/LKPP_audited_2021_.pdf	
Jika ya, berapa total pendapatan yang diterima dari perusahaan oleh BUMN?		
Jika ya, apakah transfer pemerintah ke BUMN dianggap material oleh MSG?		
Jika ya, berapa total penerimaan yang diterima dari pemerintah oleh BUMN?		
Jika ya, apakah transfer BUMN ke pemerintah dianggap material oleh MSG?		
Jika ya, berapa total penerimaan yang diterima pemerintah dari BUMN?		
Jika ya, apakah MSG telah menunjukkan bahwa pengungkapan di atas komprehensif dan dapat diandalkan?		

8. Persyaratan 4.6 Pembayaran langsung subnasional

Persyaratan	Tautan, jika ini diungkapkan secara sistematis	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Apakah pemerintah mengungkapkan informasi tentang pembayaran langsung ke daerah? Jika ya, berapa total penerimaan daerah yang diterima?	https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd	Laporan ini akan memberikan informasi singkat tentang aliran pendapatan yang terkait dengan industri ekstraktif yang dilaporkan dalam APBD 2021 yang diterapkan
Jika ya, apakah ada pengungkapan publik oleh semua perusahaan tentang pembayaran subnasional langsung yang material?	(Informasi dari perusahaan secara disagregat akan dimuat dalam Lampiran)	Laporan ini akan memberikan daftar pembayaran sub nasional langsung dari perusahaan ekstraktif berdasarkan pelaporan diri perusahaan
Jika ya, apakah ada pengungkapan publik oleh semua unit pemerintah daerah tentang pendapatan material yang dikumpulkan dari pembayaran langsung subnasional perusahaan?	(Beberapa informasi tersedia pada situs pemerintah daerah terkait)	Laporan ini akan memberikan daftar aliran pendapatan yang dibayarkan kepada pemerintah daerah yang dilaporkan oleh perusahaan pertambangan dan KKKS migas dalam formulir pelaporan. Rincian pembayaran ini dimuat dalam Lampiran Laporan dalam file excel.
Jika ya, apakah MSG telah menyetujui prosedur untuk menangani kualitas data dan jaminan pembayaran subnasional, sesuai dengan Persyaratan 4.9?	https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Kebijakan-Simplifikasi-dan-Penguatan-PDRD.pdf	Laporan ini akan memuat informasi terkini dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang baru, khususnya terkait dengan pembayaran industri migas, batubara, dan mineral.

9. Persyaratan 6.1 Pengeluaran sosial dan lingkungan

	Persyaratan	Tautan, jika ini diungkapkan secara sistematis	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Pengeluaran sosial	Apakah pemerintah mengungkapkan informasi tentang pengeluaran sosial?	Ya https://modi.esdm.go.id/comdev	
	Jika ya, berapa total belanja sosial wajib yang diterima?	Mineral/coal companies' social expenditure is regulated in:	Laporan akan berisi informasi tentang: - dasar regulasi dan elemen data, dan jumlah total dari Kontraktor minyak/gas;
	Jika ya, berapa total pengeluaran sosial sukarela yang diterima?	https://bdtbt.esdm.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Permen-ESDM-Nomor-26-Tahun-2018.pdf pasal 38	

		<p>Rencana pengeluaran sosial perusahaan pertambangan yang diperlukan harus diajukan dalam aplikasi: https://erkab.esdm.go.id/ (tidak diakses publik)</p> <p>Oil-gas contractors' social expenditures: https://www.skkmigas.go.id/publikasi/sustainability-report</p>	- dasar regulasi dan elemen data, serta jumlah total yang dicantumkan dalam RKAB untuk perusahaan minerba.
	Apakah perusahaan mengungkapkan informasi tentang pengeluaran sosial?	<p>Untuk BUMN https://www.antam.com/en/reports/csr-related-reports https://www.ptba.co.id/laporan/laporan-keberlanjutan https://timah.com/blog/report/sustainability-report.html</p> <p>Contoh perusahaan pertambangan: https://www.adaro.com/files/news/berkas_eng/2037/ADRO%2020210401%20Laporan%20Keberlanjutan%202020.pdf https://abm-investama.com/menu/31/sustainablity-reportt</p>	<p>Laporan pada bagian ini akan memberikan gambaran pengeluaran sosial sektor minyak, gas, pertambangan, termasuk nilai ringkasannya. Pembayaran terpilah yang dilaporkan secara sepihak oleh masing-masing perusahaan minyak/gas/mineral/batubara dicantumkan dalam Lampiran Laporan dalam file excel. Data didasarkan pada formulir yang diisi secara sukarela.</p>
Pengeluaran lingkungan	Apakah pemerintah mengungkapkan informasi tentang pembayaran lingkungan?	<p>Pengeluaran lingkungan oleh KKKS Minyak/Gas: https://www.skkmigas.go.id/publikasi/sustainability-report</p> <p>Pengeluaran lingkungan perusahaan mineral/batubara diatur dalam: https://bdtbt.esdm.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Permen-ESDM-Nomor-26-Tahun-2018.pdf</p>	Laporan akan menjelaskan tentang penyampaian RKAB oleh perusahaan pertambangan, informasi apa saja yang terkait dengan pengeluaran untuk reklamasi lingkungan pertambangan.
	Jika ya, berapa total pembayaran lingkungan wajib?		
	Jika ya, berapa total pembayaran lingkungan sukarela?		

10. Persyaratan 6.4 Dampak lingkungan

Persyaratan	Tautan, jika ini diungkapkan secara sistematis	Dimuat dalam Laporan EITI Indonesia ke-10
Apakah pemerintah mempublikasikan informasi tentang	https://amdalnet.menlhk.go.id/#/	Laporan akan menjelaskan tentang <ul style="list-style-type: none"> - Informasi terkait dampak lingkungan dari aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas - Informasi terkait dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan, serta ringkasan dari laporan oleh perusahaan pertambangan dalam RKAB, serta reklamasi pertambangan. - Informasi juga mengacu pada tautan online dari SKK Migas, Tekmira KESDM, dan KLHK
aturan hukum dan administrasi yang relevan untuk pengelolaan lingkungan?	Kontraktor Minyak/Gas: https://www.skkmigas.go.id/publikasi/sustainability-report	
database yang berisi penilaian dampak lingkungan, skema sertifikasi atau dokumentasi serupa tentang pengelolaan lingkungan?	Pengeluaran lingkungan perusahaan mineral/batubara diatur dalam: https://bdtbt.esdm.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Permen-ESDM-Nomor-26-Tahun-2018.pdf	
informasi lain yang relevan tentang prosedur dan administrasi pemantauan lingkungan?		

IV. Penutup

Setelah mendapat persetujuan dari MSG, Laporan EITI Indonesia ke-10 rencananya akan diterbitkan pada 28 Februari 2023.

Lampiran 1 Data untuk Pengungkapan Non-Mainstreaming

Data dari perusahaan

1. Template pelaporan yang harus diisi oleh perusahaan migas tersedia di tautan ini : <https://bit.ly/3LfV0DS>
2. Template pelaporan yang harus diisi oleh perusahaan minerba tersedia di link ini : <https://bit.ly/3S4K0vw>

Data dari Instansi Pemerintah

Data yang akan dikumpulkan dari entitas pemerintah disediakan di tautan ini : <https://bit.ly/3r8AfAr>

Lampiran 2 Daftar Perusahaan yang Material untuk Mengisi Kuesioner

A. 74 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas

No.	KKKS	Wilayah Kerja
A. Kewenangan SKK Migas		
1	BOB PERTAMINA - BUMI SIAK PUSAKO	CPP BLOCK, ONS. CENTRAL SUMATERA
2	BP BERAU LTD.	BERAU, OFF. IRIAN JAYA
3	BP MUTURI HOLDINGS B.V.	MUTURI BLOCK, IRIAN JAYA
4	BP WIRIAGAR LTD.	WIRIAGAR BLOCK, ONS. IRIAN JAYA
5	CHEVRON MAKASSAR LTD.	MAKASSAR STRAIT, OFF. MAKASSAR STRAIT
6	CHEVRON RAPAK LTD.	RAPAK
7	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM NON BULA
8	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	CORRIDOR, ONS. SOUTH SUMATRA
9	EMP (BENTU) LTD.	BENTU SEGAT, ONS. RIAU
10	PT IMBANG TATA ALAM	MALACCA STRAIT, OFF.
11	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	SENGKANG, SOUTH SULAWESI
12	ENI EAST SEPINGGAN LIMITED	EAST SEPINGGAN / EKSPLOITASI
13	ENI MUARA BAKAU B.V.	MUARA BAKAU
14	EXXONMOBIL CEPU LTD.	CEPU
15	HUSKY CNOOC MADURA LTD.	MADURA STRAIT, ONS. & OFF. EAST JAVA
16	JINDI SOUTH JAMBI B CO. LTD	SOUTH JAMBI B (2018)
17	JOB PERTAMINA - MEDCO E&P SIMENGGARIS	SIMENGGARIS, KALIMANTAN TIMUR
18	JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI	SENORO - TOILI, CENTRAL SULAWESI
19	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LTD.	BULA, SERAM
20	KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	KANGEAN, ONS. & OFF. EAST JAVA SEA
21	MEDCO E&P NATUNA LTD.	SOUTH NATUNA SEA "B", OFF.
22	MEDCO ENERGI BANGKANAI LTD.	BANGKANAI, CENTRAL / EAST KALIMANTAN
23	MEDCO ENERGI SAMPANG PTY. LTD.	SAMPANG, EAST JAVA
24	MINARAK BRANTAS GAS INC.	BRANTAS, ONS. & OFF. EAST JAVA
25	MONTD'OR (SALAWATI) LTD.	WEST SALAWATI / EKSPLOITASI
26	MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED	TUNGKAL, ONS. JAMBI
27	MEDCO ENERGI MADURA OFFSHORE PTY. LTD.	MADURA OFFSHORE, SOUTH EAST MADURA
28	PASIR PETROLEUM RESOURCES LTD.	PASIR / EKSPLOITASI
29	PC KETAPANG II LTD.	KETAPANG, EAST JAVA SEA
30	PEARL OIL (SEBUKU) LTD.	SEBUKU, OFF. SULAWESI
31	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD.	OFFSHORE NORTH WEST JAVA
32	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD.	BANGKO, ONS. SOUTH SUMATERA
33	PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.	JABUNG, ONS. JAMBI
34	PETROGAS (BASIN) LTD.	KEPALA BURUNG
35	PETROGAS (ISLAND) LTD.	SALAWATI (2018)
36	PHE NSO	NORTH SUMATRA OFFSHORE
37	PHE OGAN KOMERING	OGAN KOMERING, ONS. SOUTH SUMATRA

38	PHE SIAK	SIAK, ONS.
39	PHE TUBAN	TUBAN, ONS. JAWA TIMUR
40	PREMIER OIL NATUNA SEA BV.	NATUNA SEA BLOCK "A", OFF.
41	PT BENUO TAKA WAILAWI	WAILAWI – EAST KALIMANTAN
42	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (Periode 1 Jan sd 8 Ags 2021)	ROKAN, CENTRAL SUMATERA
43	PT MEDCO E&P INDONESIA	SOUTH SUMATERA
44	PT MEDCO E&P RIMAU	RIMAU, ONS. SOUTH SUMATERA
45	PT MEDCO E&P TARAKAN	TARAKAN ISLAND, ONS. EAST KALIMANTAN
46	PT ODIRA ENERGY KARANG AGUNG	KARANG AGUNG, SOUTH SUMATRA
47	PT PERTAMINA EP	INDONESIA
48	PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES	SOUTHEAST SUMATERA, OFF.
49	PT PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI	RAJA DAN PENDOPO, ONS. SOUTH SUMATERA
50	PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR	EAST KALIMANTAN & ATTACKA
51	PT PERTAMINA HULU MAHAKAM	MAHAKAM
52	PT PERTAMINA HULU ROKAN (Periode 9 Ags sd 31 Des 2021)	ROKAN, SUMATERA / GROSS SPLIT
53	PT PERTAMINA HULU SANGA SANGA	SANGA-SANGA, ONS. EAST KALIMANTAN
54	PT PHE KAMPAR	KAMPAR
55	PT PHE WMO	WEST MADURA, OFF. EAST JAVA
56	PT SPR LANGGAK	LANGGAK, RIAU
57	PT. MEDCO E&P LEMATANG	LEMATANG, ONS. SOUTH SUMATERA.
58	PT. PERTAMINA EP CEPU ADK	ALAS DARA KEMUNING
59	PT. PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG	JAMBI MERANG, ONS. JAMBI
60	PT. PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING	RANDUGUNTING / EXPLOITATION
61	PT. PERTAMINA HULU ENERGI SIMENGGARIS	SIMENGGARIS, KALIMANTAN TIMUR
62	PT. PERTAMINA HULU ENERGI TOMORI SULAWESI	SENORO - TOILI, CENTRAL SULAWESI
63	PT. SELE RAYA BELIDA	BELIDA, SOUTH SUMATRA
64	PT. SELE RAYA MERANGIN DUA	MERANGIN II, SOUTH SUMATRA
65	PT. TIARABUMI PETROLEUM	WEST AIR KOMERING, SOUTH SUMATRA
66	PT. TROPIK ENERGI PANDAN	PANDAN, SOUTH SUMATERA
67	SAKA ENERGI MURIAH LTD.	MURIAH
68	SAKA INDONESIA PANGKAH LIMITED	PANGKAH BLOCK, OFF. N.E. JAVA SEA
69	STAR ENERGY (KAKAP) LTD.	KAKAP, OFF. SOUTH CHINA SEA
70	TATELY N.V.	PALMERAH, JAMBI - SOUTH SUMATERA
71	TEXCAL MAHATO EP LTD.	MAHATO
B. Kewenangan BPMA		
72	TRIANGLE PASE INC.	PASE BLOCK, ONS. ACEH
73	PT. MEDCO E&P MALAKA	BLOCK "A" ACEH
74	PHE NSB	NORTH SUMATRA "B", ONS. NORTH SUMATRA

B. 125 Perusahaan Pertambangan Batubara

No	Perusahaan Batubara	Jenis Izin
1	KALTIM PRIMA COAL	PKP2B
2	ADARO INDONESIA	PKP2B
3	KIDECO JAYA AGUNG	PKP2B
4	BERAU COAL	PKP2B
5	MULTI HARAPAN UTAMA	PKP2B
6	BORNEO INDOBARA	PKP2B
7	ARUTMIN INDONESIA	IUPK
8	INDEXIM COALINDO	PKP2B
9	BUKIT ASAM TBK	IUP
10	INDOMINCO MANDIRI	PKP2B
11	MANDIRI INTIPERKASA	PKP2B
12	BHARINTO EKATAMA	PKP2B
13	TRUBAINDO COAL MINING	PKP2B
14	ANTANG GUNUNG MERATUS	PKP2B
15	ASMIN BARA BRONANG	PKP2B
16	MARUWAI COAL	PKP2B
17	MAHAKAM SUMBER JAYA	PKP2B
18	SUPRABARI MAPANINDO MINERAL	PKP2B
19	BARA TABANG	IUP
20	FIRMAN KETAUN PERKASA	PKP2B
21	MARUNDA GRAHA MINERAL	PKP2B
22	WAHANA BARATAMA MINING	PKP2B
23	TAMBANG DAMAI	PKP2B
24	SINGLURUS PRATAMA	PKP2B
25	TEGUH SINAR ABADI	PKP2B
26	SEBUKU TANJUNG COAL	IUP
27	MULTI TAMBANGJAYA UTAMA	PKP2B
28	LANNA HARITA INDONESIA	PKP2B
29	JEMBAYAN MUARABARA	IUP
30	MITRABARA ADIPERDANA	IUP
31	INSANI BARAPERKASA	PKP2B
32	PESONA KATULISTIWA NUSANTARA	PKP2B
33	BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA	IUP
34	KAYAN PUTRA UTAMA COAL	IUP
35	BARASENTOSA LESTARI	PKP2B
36	GANDA ALAM MAKMUR	IUP
37	PERKASA INAKAKERTA	PKP2B
38	GUNUNG BARA UTAMA	IUP
39	BARA ALAM UTAMA	IUP
40	BHUMI RANTAU ENERGI	IUP
41	FAJAR SAKTI PRIMA	IUP
42	KALIMANTAN ENERGI LESTARI	PKP2B
43	TANAH BUMBU RESOURCES	IUP

44	KALTIM JAYA BARA	IUP
45	MIFA BERSAUDARA	IUP
46	MULTI SARANA AVINDO	IUP
47	ALAM JAYA BARAPRATAMA	IUP
48	BUKIT BAIDURI ENERGI	IUP
49	KARTIKA SELABUMI MINING	PKP2B
50	SUNGAI DANAU JAYA	IUP
51	MUARA ALAM SEJAHTERA	IUP
52	KUTAI ENERGI	IUP
53	LASKAR SEMESTA ALAM	IUP
54	KITADIN	IUP
55	ARZARA BARAINDO ENERGITAMA	IUP
56	ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA	IUP
57	TUNAS INTI ABADI	IUP
58	WELARCO SUBUR JAYA	IUP
59	KARYA BUMI BARATAMA	PKP2B
60	JORONG BARUTAMA GREYTON	PKP2B
61	BARAMULTI SUKSESARANA	IUP
62	KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI	IUP
63	TANJUNG ALAM JAYA	PKP2B
64	ANGSANA JAYA ENERGI	IUP
65	BARAMEGA CITRA MULIA PERSADA	IUP
66	ANUGERAH LUMBUNG ENERGI	IUP
67	SEMESTA CENTRAMAS	IUP
68	PROLINDO CIPTA NUSANTARA	IUP
69	BUDI GEMA GEMPITA	IUP
70	BARAMUTIARA PRIMA	PKP2B
71	MEGA MULTI ENERGI	IUP
72	ATHA MARTHA NAHA KRAMO	IUP
73	ALHASANIE	IUP
74	KAPUAS BARA UTAMA	IUP
75	NANTOY BARA LESTARI	IUP
76	MUSTIKA INDAH PERMAI	IUP
77	KARYA PUTRA BORNEO	IUP
78	DUTA TAMBANG REKAYASA	IUP
79	ENERGI BATUBARA LESTARI	IUP
80	PIPIT MUTIARA JAYA	IUP
81	BATURONA ADIMULYA	PKP2B
82	MEGAH MULIA PERSADA JAYA	IUP
83	BUNGO BARA UTAMA	IUP
84	ASTAKA DODOL	PKP2B
85	MANAMBANG MUARA ENIM	IUP
86	DIZAMATRA POWERINDO	IUP
87	TRISENSA MINERAL UTAMA	IUP
88	SINAR KUMALA NAGA	IUP
89	INTERNASIONAL PRIMA COAL	IUP

90	BUMI MERAPI ENERGI	IUP
91	BIMA PUTRA ABADI CITRANUSA	IUP
92	KARYA USAHA PERTIWI	IUP
93	TELEN ORBIT PRIMA	IUP
94	INTI BARA PERDANA	IUP
95	HAMPARAN MULYA	IUP
96	VICTOR DUA TIGA MEGA	IUP
97	KUD GAJAH MADA	IUP
98	BANJARSARI PRIBUMI	IUP
99	CAKRAWALA DINAMIKA ENERGI	IUP
100	BARA BATU AMPAR PRIMA	IUP
101	PADA IDI	IUP
102	BINA INSAN SUKSES MANDIRI	IUP
103	BARA KUMALA SAKTI	IUP
104	SUPRA BARA ENERGI	IUP
105	SATUI TERMINAL UMUM	IUP
106	NUSANTARA BERAU COAL	IUP
107	GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL	PKP2B
108	PRIMA MULIA SARANA SEJAHTERA	IUP
109	INDOMINING	IUP
110	KADYA CARAKA MULIA	PKP2B
111	BARA ANUGRAH SEJAHTERA	IUP
112	KENDILO COAL INDONESIA	IUPK
113	ARTHA TUNGGAL MANDIRI	IUP
114	BERKAT BUMI PERSADA	IUP
115	ANJAS ANITA JAYA	IUP
116	GOLDEN GREAT BORNEO	IUP
117	ADE PUTRA TANRAJENG	IUP
118	CERENO ENERGI SELARAS	IUP
119	PUTRA MUBA COAL	IUP
120	SEMESTA ALAM BARITO	IUP
121	BARA PRIMA PRATAMA	IUP
122	TRIARYANI	IUP
123	SUMBER BARA ABADI	IUP
124	BARA ENERGI LESTARI	IUP
125	ERA ENERGI MANDIRI	IUP

C. 89 Perusahaan Pertambangan Mineral

No	Perusahaan Mineral	Jenis Izin	Jenis Mineral
1	FREEPORT INDONESIA	IUPK	Tembaga, Emas, Perak
2	AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA	IUPK	Tembaga, Emas, Perak
3	WEDA BAY NICKEL	KK	Nikel
4	ANEKA TAMBANG TBK	IUP	Emas, Perak, Nikel, Bauksit
5	AGINCOURT RESOURCES	KK	Emas, Perak
6	TIMAH (PERSERO) TBK	IUP	Timah

7	CITA MINERAL INVESTINDO TBK	IUP	Bauksit
8	BINTANG DELAPAN MINERAL	IUP	Nikel
9	VALE INDONESIA TBK	KK	Nikel
10	GAG NIKEL	KK	Nikel
11	ANUGRAH HARISMA BARAKAH	IUP	Nikel
12	KENCANA BUMI MINERAL	IUP	Nikel
13	TAMBANG TONDANO NUSAJAYA	KK	Emas, Perak
14	BUMI SUKSESINDO	IUP	Emas, Perak
15	CERIA NUGRAHA INDOTAMA	IUP	Nikel
16	HENGJAYA MINERALINDO	IUP	Nikel
17	TONIA MITRA SEJAHTERA	IUP	Nikel
18	MAKMUR LESTARI PRIMATAMA	IUP	Nikel
19	J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW	KK	Emas, Perak
20	TRIMEGAH BANGUN PERSADA	IUP	Nikel
21	INDO MURO KENCANA	KK	Emas, Perak
22	ADIDAYA TANGGUH	IUP	Bijih Besi
23	KABAENA KROMIT PRATHAMA	IUP	Nikel
24	WIJAYA INTI NUSANTARA	IUP	Nikel
25	OTI EYA ABADI	IUP	Nikel
26	TIRAN INDONESIA	IUP	Nikel
27	MEARES SOPUTAN MINING	KK	Emas, Perak
28	CITRA LAMPIA MANDIRI	IUP	Nikel
29	IFISHDECO	IUP	Nikel
30	NUSA HALMAHERA MINERALS	KK	Emas, Perak
31	CITRA SILIKA MALLAWA	IUP	Nikel
32	GERBANG MULTI SEJAHTERA	IUP	Nikel
33	DINAMIKA SEJAHTERA MANDIRI	IUP	Bauksit
34	MANDARA PRIMA NUSANTARA	IUP	Bauksit
35	MINERAL TROBOS	IUP	Nikel
36	WANATIARA PERSADA	IUP	Nikel
37	QUALITY SUKSES SEJAHTERA	IUP	Bauksit
38	FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA	IUP	Nikel
39	ROHUL ENERGI INDONESIA	IUP	Nikel
40	MENARA CIPTA MULIA	IUP	Timah
41	BHUMI KARYA UTAMA	IUP	Nikel
42	ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL	IUP	Nikel
43	BINANGA HARTAMA RAYA	IUP	Nikel
44	UNAAHA BAKTI PERSADA	IUP	Nikel
45	PRIMA DHARMA KARSA	IUP	Nikel
46	MASEMPO DALLE	IUP	Nikel
47	SUMBER BUMI PUTERA	IUP	Nikel
48	SYLVA SARI	IUP	Bauksit
49	KURNIA JAYA RAYA	IUP	Bauksit
50	HOFFMEN INTERNATIONAL	IUP	Nikel
51	ARGA MORINI INDAH	IUP	Nikel
52	ELIT KHARISMA UTAMA	IUP	Nikel

53	NUSAJAYA PERSADATAMA MANDIRI	IUP	Nikel
54	CINTA JAYA	IUP	Nikel
55	ALAM RAYA ABADI	IUP	Nikel
56	AKAR MAS INTERNATIONAL	IUP	Nikel
57	BIMA CAKRA PERKASA MINERALINDO	IUP	Nikel
58	INDRABAKTI MUSTIKA	IUP	Nikel
59	WIJAYA NIKEL NUSANTARA	IUP	Nikel
60	SINAR JAYA SULTRA UTAMA	IUP	Nikel
61	BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA	IUP	Nikel
62	VENUS INTI PERKASA	IUP	Timah
63	RIOTA JAYA LESTARI	IUP	Nikel
64	TEKNIK ALUM SERVICE	IUP	Nikel
65	MITRA SUKSES GLOBALINDO	IUP	Timah
66	BATUTUA KHARISMA PERMAI	IUP	Tembaga, Batu Gamping, Sirtu
67	KAPUAS PRIMA COAL TBK	IUP	Konsentrat Besi, Konsentrat Seng, Konsentrat Timbal
68	SYNERGY MAJU BERSAMA	IUP	Timah
69	TRISTACO MINERAL MAKMUR	IUP	Nikel
70	KONUTARA SEJATI	IUP	Nikel
71	PUTRA MEKONGGA SEJAHTERA	IUP	Nikel
72	MITRA STANIA PRIMA	IUP	Timah
73	SEBUKU IRON LATERITIC ORES	IUP	Bijih Besi
74	ANUGRAH SUKSES MINING	IUP	Nikel
75	BINTANG TAYAN MINERAL	IUP	Bauksit
76	JAGAD RAYATAMA	IUP	Nikel
77	BANGKA SERUMPUN	IUP	Timah
78	SAGO PRIMA PRATAMA	IUP	Emas, Perak, Nikel
79	MULIA PACIFIC RESOURCES	IUP	Nikel
80	MANUNGGAL SARANA SURYA PRATAMA	IUP	Nikel
81	KONINIS FAJAR MINERAL	IUP	Nikel
82	TRINUSA DHARMA UTAMA	IUP	Nikel
83	GANE PERMAI SENTOSA	IUP	Nikel
84	ANG AND FANG BROTHER	IUP	Nikel
85	TAMBANG BUMI SULAWESI	IUP	Nikel
86	SINAR MUTIARA SEJAHTERA	IUP	Timah
87	WAJA INTI LESTARI	IUP	Nikel
88	TEKINDO ENERGI	IUP	Nikel
89	BANGKA BELITUNG TIMAH SEJAHTERA	IUP	Timah